

BAB III

FAKTOR KEBIJAKAN BEBAS VISA DI ERA JOKO WIDODO

Terdapat berbagai hal terkait dengan sosial, ekonomi dan politik yang terjadi antar negara dan bangsa. Pada Era Presiden Joko Widodo, menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia harus lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Sejalan dengan hal ini, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) akan menjadi ujung tombak dari pelaksanaan diplomasi ekonomi. Menteri Luar Negeri RI dalam Pernyataan Pers Tahunan tahun 2015 menyatakan bahwa berdasarkan visi dan misi Presiden Jokowi, politik luar negeri Indonesia akan diprioritaskan kepada menjaga kedaulatan Indonesia dengan memfokuskan kepada diplomasi perbatasan; peningkatan perlindungan terhadap WNI, serta peningkatan diplomasi ekonomi. Adanya salah satu kebijakan yang mampu mendorong perekonomian adalah kebijakan Bebas Visa.

A. Kepemimpinan Joko Widodo

Joko widodo yang lahir tanggal 21 juni 1961 di Surakarta anak pasangan dari Noto Miharjo dan Sujiatmi Notomiharjo. Sejak usia 12 tahun sudah kerja menggergaji kayu yang akan dibuat mebel di perusahaan mebel keluarganya.¹Jokowi yang awalnya hanya anak tukang mebel dan akhirnya bisa berhasil menduduki jabatan penting yaitu Gubernur DKI.Namun nasib baik dan garis tangan menentukan siapa sosok Jokowi.Selama kuliah pak Jokowi bukanlah

¹<http://www.biografiku.com/2012/02/biografi-joko-widodo-jokowi.html>diakses 28 februari 2017

aktifis yang aktif dalam keorganisasian kampus. Jokowi lebih memilih menjadi mahasiswa biasa yang tekun belajar agar bisa mendapatkan gelar insinyurnya tepat waktu. Kuliah di kehutanan UGM bagi Jokowi sesuatu yang menyenangkan, mengingat Jokowi memang dibesarkan di lingkungan keluarga yang turun temurun menggeluti perkayuan.

Kemudian Joko Widodo diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menjadi Walikota Solo. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan yang pesat. Branding untuk Kota Solo dilakukan dengan menyetujui slogan Kota Solo yaitu —Solo: The Spirit of Java.

Berkat kerja kerasnya di Solo selama 5 tahun dan membawa hasil yang baik, Jokowi kembali memenangkan hati rakyat lagi. Mayoritas warga Solo memilihnya dan kembali menjabat menjadi Walikota Solo untuk kedua kalinya. Semua layanan publik berfungsi dengan baik dan berkembang pesat sehingga Solo terbilang sebagai kota yang biasa dikatakan cukup berhasil. Pada Januari 2013, Joko Widodo dinobatkan sebagai wali kota terbaik ke 3 di dunia atas keberhasilannya dalam memimpin Surakarta sebagai kota seni dan budaya, kota paling bersih dari korupsi, serta kota yang paling baik penataannya.

Tepatnya tanggal 16 Oktober 2012 yang lalu Jokowi dilantik sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Belum lama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, PDIP Perjuangan melalui mandat dari Megawati Soekarno

Putri memberikan perintah agar Jokowi maju sebagai Calon Presiden bersama Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden pada tahun 2014.²

Pada bulan juli 2014, Joko widodo berhasil dinyatakan sebagai pemenang dalam perhitungan suara oleh KPU Indonesia Jokowi-Jusuf Kalla diberhasil memengankan Pemilihan Presiden pada tahun 2014 dengan perolehan suara sebesar 53,15% atau 70.997.833.³Joko widodo mulai menjalankan program-programnya sesuai dengan perencanaan yang telah di rancang. Kemudian tepatnya pada tahun 2015 dalam keputusan presiden Nomor 69, Joko widodo mengeluarkan peraturan mengenai kebijakan bebas visa kunjungan kepada beberapa Negara guna meningkatkan perekonomian dan mendongkrak devisa Negara sesuai dengan program yang telah dibuat.

B. Faktor Kebijakan Bebas Visa

Dalam hal diplomasi ekonomi, Kemlu akan memprioritaskan kebijakannya pada peningkatan diplomasi ekonomi yang berorientasikan pada kepentingan rakyat Indonesia. Hal ini menjadikan Kemenlu melalui perwakilan Indonesia di luar negeri sebagai pelaksana diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi secara singkat dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk mempromosikan potensi ekonomi suatu negara. Diplomasi ekonomi juga dapat diartikan sebagai upaya pemerintah beserta segenap pemilik kepentingan yang terlibat dalam suatu kegiatan di bidang ekonomi, yang mencakup perdagangan komoditas, investasi, pariwisata, ketenagakerjaan dan kerja sama teknik yang bertujuan untuk

² Ibid

³ Ibid

mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, mendukung pembangunan nasional dan memajukan kepentingan Indonesia di kancah dunia.⁴

Peran perwakilan Indonesia sangat strategis dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi. Pejabat di perwakilan Indonesia harus memiliki kemampuan untuk menguasai pasar melihat potensi dan peluang kerja sama di negaranya. Para diplomat juga dituntut untuk bisa menjalankan perannya sebagai *trade policy intelligence* dengan cara pengamatan terhadap kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah setempat dan menyampaikan saran kepada pusat terkait kebijakan yang dapat Indonesia ambil dalam menyikapi kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah setempat. Jika kepentingan ekonomi Indonesia berpotensi terancam dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tersebut, maka harus ada yang dapat berperan sebagai negosiator untuk membela kepentingan Indonesia.

Terlepas dari peran pemerintah yang utama, Kebijakan bebas visa ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menarik orang asing untuk masuk ke Indonesia dengan melihat sumber daya dan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, baik dari sektor perdagangan, investasi, dan juga pariwisata.

1. Faktor Perdagangan

Kekayaan akan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia tentunya memiliki manfaat untuk membantu Indonesia secara finansial. Sumber daya alam Indonesia memiliki nilai jual yang tinggi. Di bidang perdagangan, saat ini ekonomi

⁴ Pedoman Umum Upaya Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi, BPPK, 2015

Indonesia di fokuskan pada persoalan ekspor-import. Selama ini ekspor dari Indonesia cenderung fokus pada pasar-pasar tradisional seperti Amerika, Jepang, Singapura, Korea, serta negara-negara yang berada dikawasan Eropa Barat seperti Inggris dan Belanda. Tidak hanya berorientasi pada pasar tradisional akan tetapi melihat peluang pasar non tradisional seperti Portugal, Swedia, serta Irlandia yang mana negara-negara tersebut juga memiliki potensi bagi nilai perdagangan Indonesia.⁵

Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa, neraca perdagangan tahun 2015 tersebut didorong oleh naiknya surplus neraca perdagangan nonmigas dan menurunnya defisit neraca perdagangan migas. Neraca perdagangan Indonesia pada Bulan Desember 2015 mengalami defisit sebesar 0,23 miliar dolar AS, lebih baik dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencatatkan defisit sebesar 0,41 miliar dolar AS. Surplus neraca perdagangan nonmigas ini didorong oleh pertumbuhan ekspor nonmigas sebesar 10,12 persen (mtm), lebih tinggi dari pertumbuhan impor nonmigas yang sebesar 4,50 persen (mtm).

Kebijakan bebas visa diharapkan mampu menjadi tombak untuk mempermudah jalur perdagangan antar negara. Setiap tahunnya perdagangan Indonesia mengalami perubahan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

⁵ibid

NERACA PERDAGANGAN INDONESIA TAHUN 2015-2017⁶

No	Uraian	2015	2016	2017	CHANGE (%) 2016/2017
I	E X P O R T	150.366,3	144.433,5	40.607,0	20,84
	- OIL & GAS	18.574,4	13.087,0	3.950,2	14,15
	- NON OIL & GAS	131.791,9	131.346,5	36.656,8	21,61
II	I M P O R T	142.695,6	135.650,7	36.680,2	14,83
	- OIL & GAS	24.613,2	18.724,8	6.563,1	68,42
	- NON OIL & GAS	118.082,4	116.925,9	30.117,1	7,38
III	TOTAL	293.061,9	280.084,2	77.287,2	17,91
	- OIL & GAS	43.187,5	31.811,8	10.513,3	42,89
	- NON OIL & GAS	249.874,3	248.272,4	66.773,9	14,75
IV	BALANCE	7.670,7	8.782,8	3.926,8	136,78
	- OIL & GAS	-6.038,8	-5.637,8	-2.612,9	-498,88
	- NON OIL & GAS	13.709,5	14.420,6	6.539,7	212,20

Sumber: BPS, Processed by Trade Data and Information Center, Ministry of Trade 9

Neraca di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 sampai tahun 2017, kinerja export baik bersumber dari oil dan gas, maupun dari non oil dan gas mengalami perubahan dari tiga tahun terakhir sebesar 20,84%. Kemudian dari kinerja import dari dua tahun terakhir mengalami perubahan sebesar 14,83%. Selanjutnya jumlah total perubahan export maupun import dari tahun 2016 sampai tahun 2017 yang bersumber dari oil dan gas serta non oil dan gas sebesar 17,91%.

Berdasarkan hasil survei Ease of Doing Business (EoDB) 2017 Bank Dunia menyatakan pada 26 Oktober 2016 lalu, Indonesia berada pada peringkat

⁶<http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/indonesia-trade-balance>

91 dari 190 negara. Indonesia mengalami perubahan perbaikan yang sangat signifikan, hingga naik ke peringkat 15 dari tahun sebelumnya, yang awalnya berada di peringkat 106 melonjak drastis. Sebelumnya, pada survei EoDB 2015, Indonesia berada di peringkat 114 naik 8 peringkat dari posisi 122, kemudian pada laporan EoDB 2016, terjadi penyesuaian peringkat tahun 2015 dimana Indonesia berada di peringkat 109.

Pemerintah telah menyusun paket kebijakan ekonomi jilid I-XIII yang bertujuan untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi dengan menyederhanakan prosedur, percepatan waktu pelayanan perizinan dan pengurangan biaya serta penataan perizinan melalui pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelayanan perizinan melalui sistem elektronik (online) serta penegakan hukum dan kepastian usaha menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong kenaikan peringkat tersebut.⁷

2. Faktor Investasi

Investasi merupakan sesuatu yang penting dalam meningkatkan perekonomian suatu bangsa. Di karenakan investasi mampu mendorong penambahan pendapatan nasional atau perekonomian secara berlipat ganda, selanjutnya dengan adanya investasi akan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan guna berkurangnya pengangguran baik untuk penduduk lokal maupun buruh dari luar yang masuk ke Indonesia. Berkurangnya penganggurantentu akan

⁷http://www2.bkpm.go.id/images/uploads/file_siara_n_pers/Siara_n_Pers_BKPM_261016-Survei_EODB_2017_Bank_Dunia_Umumkan_RI_Teratas_di_Daftar_Top_Reformers.pdf diakses pada 20 april 2017

mengurangi kemiskinan. Berkurangnya kemiskinan akan berdampak pada teratasinya masalah-masalah lain seperti gizi buruk, buta huruf, kejahatan dan lain-lain sebagainya.

Selain itu dengan adanya investasi ini, dapat digunakan sebagai pemerataan, pemerataan antar negara, sektor dan juga individu. Pemerataan yang bertujuan untuk mempermudah ketimpangan ekonomi yang terjadi, adanya pemerataan ini investor yang bersedia memberikan investasinya ke suatu daerah atau negara di berikan keringanan atau izin untuk tinggal dan menanam modal di Indonesia. Sehingga adanya daya tarik tersendiri untuk investor menaruh investasinya.

Pada realitanya investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman modal dalam Negeri pada awal 2015 naik 16,6 % (dibanding pada awal tahun 2014) dengan nominal Rp 259,7 triliun. Jika dihitung dari triwulan pertama 2015, realisasi investasi meningkat 8,4 %. Target tahun ini, nominal realisasi investasi mencapai Rp 519 triliun, atau naik sekitar 14 % dari pencapaian tahun 2014.⁸

Salah satu hal yang mempengaruhi besarnya minat investasi, dikarenakan mudahnya akses perizinan atau dipermudahnya perizinan investasi di dalam negeri maupun luar Negeri. Di karenakan saat itu yang menjadi keluhan utama para investor adalah rumitnya perizinan di Indonesia, termasuk birokrasi regulasi yang tumpang tindih, dan banyak hal lainnya, sehingga sulitnya investor menanam modalnya di Indonesia.

⁸ <http://www.mri-research-ind.com/berita-328-minat-investasi-di-indonesia-meningkat.html> di akses pada 2 april 2017

Adanya Kemudahan atau pembebasan visa yang dilakukan oleh Indonesia saat ini, tidak heran jika Jepang menempatkan Indonesia sebagai negara nomor empat tujuan investasi. Diikuti oleh Taiwan yang menempatkan Indonesia sebagai nomor lima. Bahkan, Tiongkok memposisikan Indonesia sebagai tujuan investasi nomor dua setelah Amerika Serikat. Korea Selatan menempatkan Indonesia di urutan keenam setelah China, Amerika, Vietnam, India dan Uzbekistan, dan yang terakhir, Singapura masih tetap menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi nomor dua.⁹

Jumlah investasi di Indonesia setiap tahunnya meningkat, dikarenakan adanya kemudahan bagi investor atau penanam modal untuk berinvestasi. Mudah akses perizinan dan adanya dampak positif dari kebijakan bebas visa yang di canangkan oleh pemerintah. Di kawasan Asia Tenggara saja, pertumbuhan PMA Indonesia sebesar 20%, ini merupakan yang tertinggi di antara negara lainnya. Pertumbuhan PMA di Singapura sendiri mencapai 4,2 persen meskipun jumlah PMA-nya sebesar US\$ 67,5 miliar, atau tiga kali lipat lebih besar dari Indonesia.¹⁰

Adanya staregi yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan investasi yaitu di prioritaskan pada 5 sektor Infrastruktur, Pertanian, Industri, Maritim, serta pariwisata dan kawasan. Selain itu juga BKPM mengumumkan realisasi investasi pada triwulan ketiga (Juli-September) tahun 2016 tercatat

⁹Ibid

¹⁰<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150625010145-92-62208/naik-20-investasi-asing-di-indonesia> diakses 2 april 2017

sebesar Rp 155,3 triliun, meningkat 10,7% dibandingkan periode yang sama Tahun 2015. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 55,6 triliun, meningkat 16,3% dibandingkan periode sama tahun lalu, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp 99,7 triliun atau tumbuh 7,8%.

Untuk realisasi investasi dari Januari-September 2016 mencapai 453,4 triliun, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (sebesar Rp 400 triliun). Realisasi investasi PMDN, Januari-September meningkat 18,8% sebesar Rp 158,2 triliun, sementara realisasi investasi PMA naik 10,6% sebesar Rp 295,2 triliun. Realisasi investasi sepanjang Januari-September 2016 dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 960.041 orang.¹¹

Banyaknya kemudahan yang di dapatkan saat ini di karenakan kebijakan bebas visa mempermudah Orang Asing untuk menanam sahamnya di Indonesia, sehingga saat ini jumlah investasi yang ada di Indonesia setiap tahunnya kian bertambah.

¹¹<http://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita-investasi/bkpm-sampai-akhir-september-2016-realisasi-> diakses 2 april 2017

Triwulan IV dan JANUARI – DESEMBER 2016 : Dibanding Tahun 2015

Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Triwulan IV Tahun 2016 Per Triliun.

	TW I 2015	TW II 2015	TW III 2015	TW IV 2015	Jan-Des 2015	TW I 2016	TW II 2016	TW III 2016	TW IV 2016	Jan - Des 2016	Target *)	Capaian **)
TOTAL	124,6	135,1	140,3	145,4	545,4	146,5	151,6	155,3	159,4	612,8	594,8	103,0%
PMDN	42,5	42,9	47,8	46,2	179,5	50,4	52,2	55,6	58,1	216,2	208,4	103,8%
PMA	82,1	92,2	92,5	99,2	365,9	96,1	99,4	99,7	101,3	396,6	386,4	102,7%

Sumber:Badan Koordinasi Penanaman Modal

KET: PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri PMA : Penanaman Modal Asing

- Nilai investasi Triwulan IV 2016 merupakan realisasi investasi langsung yang dilakukan selama 3 bulan periode laporan (Oktober – Desember 2016) berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diterima BKPM dari perusahaan PMA dan PMDN.
- Di luar investasi Migas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, dan Industri Rumah Tangga
- Nilai investasi dalam Rp Triliun (T) dan Kurs US\$ 1 = Rp 13.900 sesuai dengan APBN 2016 untuk Triwulan I dan Triwulan II 2016, Kurs US\$ 1 = Rp 13.500 sesuai dengan APBN-P 2016 untuk Triwulan III dan Triwulan IV 2016
- Realisasi investasi pada Triwulan IV 2016: Rp 159,4 T, meningkat 2,6% dari Triwulan III 2016 (Rp 155,3 T) atau meningkat 9,6% dari Triwulan IV 2015 (Rp 145,4 T)
- Realisasi investasi pada Januari-Desember 2016: Rp 612,9 T, meningkat 12,4% dari tahun sebelumnya yaitu Januari–Desember 2015 (Rp 545,4T)¹²

Tepatnya pada tahun 2017 ditriwulan I, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 68,8 Triliun, naik 36,4% dari Rp 50,4 triliun pada periode yang sama tahun 2016, dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 97,0 triliun, naik 0,94% dari Rp 96,1 triliun pada periode yang sama tahun 2016. Angka yang dimainkan cukup fantastic dan meningkat.

Penyerapan tenaga kerja Indonesia pada awal 2017 mencapai 194.134 orang yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 67.807 orang dan dari proyek PMA

¹²http://www2.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Bahan_Paparan_TW_IV_2016.pdf di akses 4 maret 2017

sebanyak 126.327 orang.¹³ Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 2017 kuartal 1 mencapai Rp 165,8 triliun. Angka itu terus tumbuh menjadi 13,2 persen dibandingkan Rp 146,5 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Adapun realisasi investasi tersebut menyerap 194.000 tenaga kerja.

Pertambangan merupakan Investasi yang menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya, saat ini pertambangan terhitung (Rp 23,6 triliun atau 14,2 persen), diikuti industri makanan (Rp 18,5 triliun atau 11,1 persen), transportasi, gudang, dan telekomunikasi (Rp 18,4 triliun atau 11,1 persen), listrik, gas, dan air (Rp 16,7 triliun atau 10,1 persen), serta industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik (Rp 15,2 triliun atau 9,2 persen).¹⁴

Negara dengan Penanaman Modal Asing yang memilikisaham terbesar di Indonesia adalah Singapura dengan total 2,1 miliar dollar AS atau 28,2 persen, kemudian Jepang 1,4 miliar dollar AS atau 19,2 persen, di susul oleh China 0,6 miliar dollar AS atau 8,2 persen, kemudian Amerika Serikat 0,6 miliar dollar AS atau 8,2 persen, dan yang terakhir Korea Selatan dengan jumlah 0,4 miliar dollar AS atau 5,8 persen.¹⁵

3. Faktor Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dan sangat berpengaruh dalam mendongkrak perekonomian negara, dikarenakan pariwisata yang dimiiki

¹³<http://www.depkes.go.id/article/print/17042600004/realisasi-investasi-triwulan-i-2017-tumbuh-13-2-.html> diakses 15 maret 2017

¹⁴<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/04/26/152526926/kuartal.i.2017.realisasi.investasi.di.i.ndonesia.capai.165.8.triliun> diakses 15 maret 2017

¹⁵ Ibid.

Indonesia memiliki daya jual yang tinggi. Tepatnyapada event *World Economic Forum* tahun 2013, Indonesia saat itu memperoleh posisi ke-70 sebagai negara dengan daya saing pariwisata. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah RI terus berusaha untuk dapat memperbaiki daya saing pariwisatanya dengan menargetkan posisi ke 30 pada tahun 2019. Pada tahun 2014, bidang pariwisata berkontribusi sebesar 3.78% bagi perekonomian nasional. Sedangkan devisa yang ikut disumbangkan dari sektor pariwisata adalah sebesar US\$ 10.69 miliar.¹⁶

Pemerintah Indonesia selama ini menargetkan 19 negara sebagai fokus utama pariwisata Indonesia diantaranya Jepang, Korea Selatan, Rusia, Australia serta China. Tahun 2014 tercatat bahwa ada 4 (empat) negara yang paling banyak melakukan kunjungan ke Indonesia, yaitu: Singapura, Malaysia, Australia dan China.

Selain itu, kebijakan pemerintah dengan pemberian Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) bagi 5 negara yakni; Australia, Jepang, Korea, China, dan Rusia yang mulai diterapkan tahun 2015 merupakan salah satu *trigger* bagi meningkatnya jumlah wisatawan dari negara tersebut sehingga target jumlah wisatawan mancanegara yang telah ditetapkan pemerintah untuk 5 (lima) tahun mendatang akan dapat tercapai.

Saat ini Pariwisata menjadi prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019. Secara bertahap dari tahun ke tahun dalam periode 5 tahun RPJM 2015-2019 pembangunan pariwisata diprioritaskan dan diberi target pencapaiannya. Pariwisata sebagai sektor yang strategis dan menjadi media integrasi program dan kegiatan antar sektor pembangunan, sehingga pariwisata sangat

¹⁶ <http://www.pidii.co.id/materi-inti-pariwisata-2017/> di akses pada 15 maret 2017

masuk akal ditetapkan menjadi *leading* pembangunan, artinya dapat menggerakkan perekonomian bangsa.¹⁷

Kebijakan pemerintah memberi kemudahan kepada setiap wisatawan yang masuk dan berkunjung ke Indonesia, dengan adanya kebijakan bebas visa ini membantu memajukan pariwisata Indonesia. Selain itu juga tepatnya tahun 2015 sampai 2016 angka kunjungan wisatawan naik drastis, sehingga lambat laun devisa Negara dapat meningkat dan membantu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Awal 2017 merupakan angin segar bagi Indonesia dikarenakan kebijakan bebas visa ini memberi banyak sumbangsi bagi Indonesia.

Kebijakan bebas visa bagi wisman di Indonesia merupakan sebuah strategi Pemerintah untuk meningkatkan daya saing di sektor industri pariwisata— demi menghadapi dinamika persaingan MEA yang mulai dibuka pada awal tahun 2016 lalu. Pembebasan pajak visa tersebut menjadi sebuah langkah awal untuk menciptakan peluang bagi industri pariwisata di Indonesia. Namun peluang tersebut hanya akan dapat dimanfaatkan dengan kesiapan Pemerintah dari aspek pelayanan dan keamanan. Aspek pelayanan bagi wisman yang masuk ke Indonesia dapat ditingkatkan dengan optimalisasi pembangunan infrastruktur serta Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kepariwisataan. Selain aspek pelayanan, hal penting lainnya yang harus disoroti oleh Pemerintah adalah aspek keamanan domestik yang stabil. Situasi keamanan domestik harus sepenuhnya dikendalikan dan dijamin oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah demi menjamin keamanan bagi para wisman yang berkunjung ke Indonesia.

¹⁷<http://setkab.go.id/tahun-2017-kita-genjot-sektor-pariwisata/> diakses 24 april 2017

Pembangunan pariwisata pada tahun 2015 merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 yang merupakan Rencana Strategis (Renstra) dari Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019. Tepatnya pada tahun 2015–2019 merupakan pelaksanaan Visi dan Misi Presiden terpilih. Dalam RPJMN tahun 2015–2019 memuat Strategi Pembangunan Nasional, Kebijakan Umum, Prioritas Nasional, dan Program serta Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Adanya Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan yang akan dijalankan.

Adanya evaluasi yang di lakukan Kementerian Pariwisata atas pelaksanaan RPJMN 2015–2019, dan tahun 2015 merupakan evaluasi tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2015–2019. Pembangunan kepariwisataan nasional sampai dengan tahun 2019 memiliki sasaran yang strategis yang dituangkan dalam sejumlah indikator pencapaian sebagai berikut:¹⁸

¹⁸<http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/test/LAKIP-KEMENPAR%202015.pdf> diakses 20 april 2017

Tabel Capaian RPJMN Tahun 2015

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2015		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (Juta orang)	Rata-rata pertumbuhan 7,93 % per tahun	10,63 %	134 %
2	Meningkatnya jumlah pergerakan wisatawan nusantara	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (Juta perjalanan)	Rata-rata pertumbuhan 2,1% per tahun	1,53 %	72,8 %
3	Meningkatnya jumlah penerimaan devisa	Jumlah penerimaan devisa (US\$ miliar)	Rata-rata pertumbuhan 10,7% per Tahun	13,1 %	122 %
4	Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara	Jumlah pengeluaran per wisatawan mancanegara per kunjungan (US\$)	Rata-rata pertumbuhan 2,5% per tahun	0,05 %	20 %
5	Meningkatnya jumlah pengeluaran	Jumlah pengeluaran per wisatawan	Rata-rata pertumbuhan 4% per tahun	5 %	125 %

	wisatawan nusantara	nusantara per kunjungan (ribu Rp)			
6	Meningkatnya jumlah tenaga kerja di bidang pariwisata	Jumlah penyerapan tenaga kerja di bidang pariwisata (juta orang)	Rata-rata pertumbuhan 9,8% per tahun	18%	183 %
7	Meningkatnya kontribusi produk domestik bruto di bidang Kepariwisataan	Kontribusi sektor pariwisata terhadap produk Domestik Bruto (PDB) nasional (Triliun Rp)	Rata-rata pertumbuhan 5,8% per tahun	4,23 %	72,8 %

Sumber: Diolah dari data pariwisata 2015

Tepatnya pada tahun 2015 kementerian pariwisata berhasil memenuhi sasaran strategis yang telah di targetkan. Dengan demikian, lambat laun Indonesia mampu mengembangkan dan memajukan pariwisata. Pariwisata Indonesia memiliki kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Tepatnya tahun 2015 saja, sektor pariwisata menciptakan devisa yang tinggi, sebesar US\$ 11,9 miliar US\$ atau setara Rp. 163 trilliun (meningkat 113% dibandingkan tahun 2014 yang mencapai angka devisa sebesar US\$ 11,17 miliar). Pariwisata juga memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Sektor pariwisata tahun 2015 mampu menyerap tenaga kerja sebesar 12,16 juta orang.¹⁹ Sektor Pariwisata merupakan sektor yang efektif dalam menjawab kebutuhan peningkatan nilai tambah ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan (pro poor) dan penciptaan lapangan kerja (pro-job)

¹⁹ ibid